

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional
- Data penyalahgunaan faktur pajak sumber laporan tahunan DJP/<http://ortax.org/?mod=issue&page=show&id=68/>
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Easy of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly. Vol. 13, No. 5, pp. 319-400
- Effendy, Onong Uchjana. 1998. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung PT. Remaja Rosda Karya
- Fasmi, Lasnofa, and Fauzan Misra. "Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5.1 (2014).
- Given, Lisa M. (editor). 2008. The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methodes. California, Sage-Thousand Oaks.
- Green, I. W., & Kreuter, M. W., 1991. Health Promotion Planning An Education and Enviromental Approach. Second Edition. USA : Mayfield Publising Company
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : Kep-136/PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Kurniawan, Ary, and Fitrotun Niswah. "Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)." *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan* 4.2 (2016).
- Moleong, Lexy J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

- Muhammad, Arie, and Totok Dewayanto. Analisis Penerimaan Komputer Mikro dengan Menggunakan Teknologi Acceptance Modal (TAM) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. Disss Universitas Diponegoro, 2010.
- Niven, N. Psikologi Kesehatan. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. 2002.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Peraturan Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal.
- Ratsidyaningtyas, Azzilizza Febri. "Analisis Penerimaan *E*-Faktur Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Pengusaha Kena Pajak." (2016).
- Sari, Selfi Ayu Permata, and Devi Pusposari. "Penerapan *E*-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 4.1 (2015).
- Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Radar Jaya Offset. 2001.
- Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Susanto, Edi. "Elektronik Faktur (*E*-Faktur): Apakah Sudah Efektif Bagi Pengusaha Kena Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai?." *Jurnal STIE Semarang* 8.1 (2016).

- Tangke, N. 2004. Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6(1): 10 – 8
- Yin, Robert K, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.